

# BAB I

## LATAR BELAKANG

### 1.1 Identifikasi Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan dialami setiap kota di dunia. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di dunia serta tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. PBB atau yang disebut Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan suatu program disebut The Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2002 yang diikuti oleh 189 negara. MDGs memiliki target untuk mengurangi 50% dari banyaknya masyarakat miskin pada 2015 silam. Pada program ini MDGs berhasil mengeluarkan penduduk dunia dari kemiskinan sebanyak 700 juta jiwa termasuk negara yang berkembang, maka menimbulkan efek meningkatnya kesehatan ditandai dengan ketersediaan akses air bersih dan pendidikan yang maju (Ishartono, 2016).

Pada program MDGs terjadinya perubahan yang mana perubahan tersebut dari MDGs menjadi SDGs tahun 2015 sampai 2030. Konsep SDGs ini adalah target sangat penting bagi negara anggota PBB bertujuan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan pada negara berkembang terutama di Indonesia. Kemiskinan adalah permasalahan multidimensi yang rumit serta menjadikan fokus pembangunan. Hal ini dicapai melalui pengembangan kebijakan serta fokus pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Kemunculan konsep SDGs di Indonesia serta negara berkembang lainnya menjanjikan untuk mengatasi masalah mendasar seperti kemiskinan dan kelaparan, peningkatan pemerataan pendapatan,

munculnya kesetaraan gender, energi yang terjangkau, air bersih, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, serta mendorong tumbuhnya ekonomi (World Bank, 2004). Pemerintah Indonesia sudah memiliki banyak proyek pengentasan kemiskinan. Namun, rencana tersebut harus ditinjau ulang dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional berbasis pengurangan kemiskinan. Upaya pengurangan kemiskinan dilaksanakan dalam terwujudnya harapan nasional, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur (Ferezagia, 2018).

Kemiskinan adalah topik yang harus dipecahkan. Pengurangan kemiskinan yaitu program utama pemerintah. Menurut Niemietz (2011) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Sedangkan Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan bahwa kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran.

Lalu Kuncoro (2002) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dapat di simpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak mampu untuk meningkatkan standard hidup yang lebih baik.

Larasati Prayoga, dkk (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa

adanya tambahan kesempatan kerja. Kemiskinan memang masalah yang kompleks. Efektifitas kebijakan pemerintah baik pusat maupun lokal menjadi peran penting penyebab kemiskinan.

Kemiskinan dapat dilihat dari bermacam dimensi non-moneter dimana mengindikasikan bahwasanya masyarakat miskin itu sendiri memiliki kualitas yang lebih buruk. Maka dari itu, kemiskinan mestinya diukur dalam berbagai dimensi (multi dimensi). Kemiskinan dapat dijelaskan dalam kerangka multidimensi kemiskinan dari dimensi yang berbeda serta memikirkan kemiskinan dari perspektif yang berbeda. Pengentasan kemiskinan jadi sebuah rencana dari 17 rencana yang ada pada SDGs di resmikan PBB pada september 2015. Tujuan utama MDGs yaitu “*No Poverty*” tidak ada kemiskinan di manapun (Yossi, 2018).

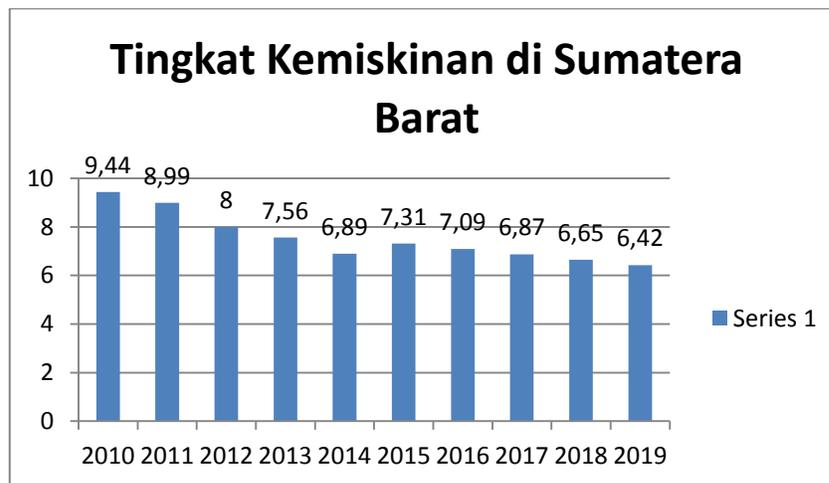
Untuk mewujudkan kebijakan serta program pemerintah mengurangi kemiskinan, lahirnya SDGs untuk negara Indonesia diharapkan untuk mengatasi seperti kemiskinan serta kelaparan, meningkatkan pendapatan yang merata, kemajuan pendidikan, keterjangkauan energi, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak, air bersih, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi (World Bank, 2004).

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), teori kekuatan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need method*) digunakan ketika menakar kemiskinan. Berdasarkan metode ini indikator dipakai, yakni: Population Index (HCI), ialah persentase rakyat miskin di bawah Garis Kemiskinan, dan Poverty Gap Index atau Indeks Kedalaman Kemiskinan, yakni ukuran kesenjangan, dalam *outcome* masyarakat miskin relatif

terkait garis kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, dimana nilainya memberikan visualisasi tentang distribusi *outcome* masyarakat miskin.

Di bawah ini data terkait tingkat kemiskinan di kota serta kabupaten di wilayah provinsi Sumatera Barat tahun 2014 hingga tahun 2019:

**Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2019**

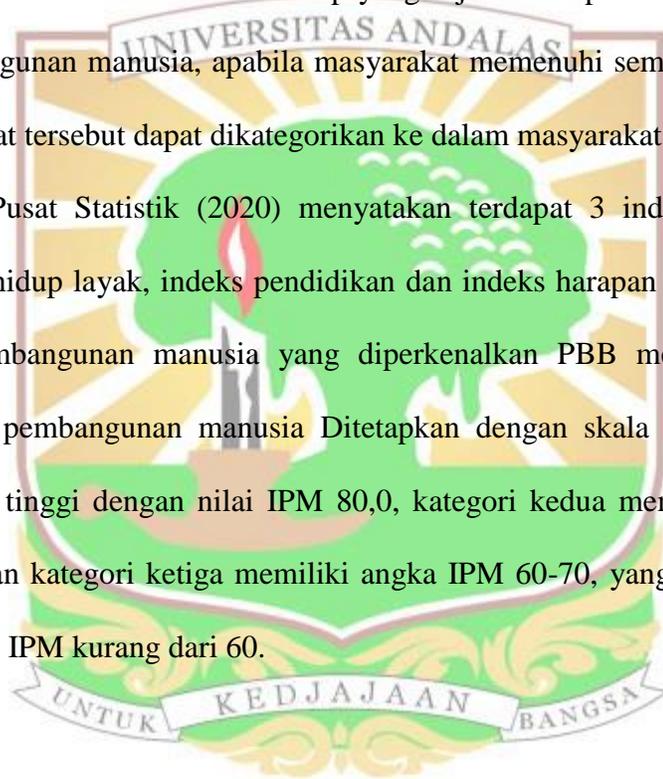


Sumber: BPS Prov. Sumbar, tahun 2020.

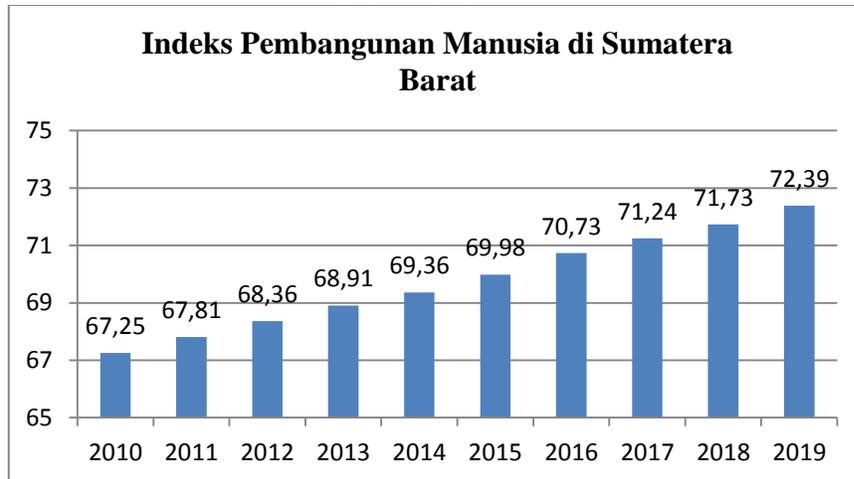
Bisa kita lihat bahwasanya level kemiskinan pada Provinsi Sumatera Barat fluktuatif tahun 2010 sampai tahun 2019, yang mana rata-rata persentase level kemiskinan pada tahun 2010 hingga tahun 2019 di angka 6,94%. Dimana angka persentase tingkat kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 9,44% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 6,89 %, serta pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 7,31% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 6,42%.

Sjafi'i dan Hidayati (2009) mengemukakan bahwa SDM berkualitas adalah penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lain dari itu, pada aspek ekonomi, penyebab kemiskinan ialah efek rendah kualitas sumber daya manusia (Kuncoro, 2006). Kita bisa menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tingkat sejahtera seseorang. Ini merupakan terobosan baru untuk mengukur pembangunan manusia. Indeks taraf hidup yang sejahtera dapat memberi visualisasi tentang pembangunan manusia, apabila masyarakat memenuhi semua komponen itu, maka masyarakat tersebut dapat dikategorikan ke dalam masyarakat sejahtera.

Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan terdapat 3 indikator IPM yaitu indeks standar hidup layak, indeks pendidikan dan indeks harapan hidup. Sementara itu konsep pembangunan manusia yang diperkenalkan PBB menyatakan bahwa tingkat kinerja pembangunan manusia ditetapkan dengan skala 0,0100, 0 adalah kategori sangat tinggi dengan nilai IPM 80,0, kategori kedua memiliki angka IPM tinggi 70-80, dan kategori ketiga memiliki angka IPM 60-70, yang terakhir tingkat rendah dan nilai IPM kurang dari 60.



**Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2019**

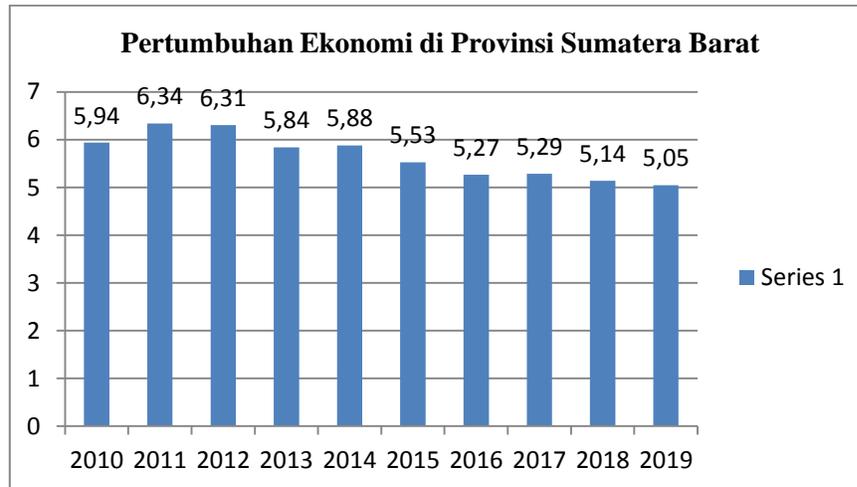


*Sumber: BPS Prov. Sumbar, tahun 2020.*

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia rata-rata Sumbar mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2019. Pertama, IPM Sumbar 67,25% pada 2010 dan meningkat sampai persentase 72,39% pada tahun 2019. Dengan kisaran 70-80%, mencapai rata-rata tertinggi dalam kategori tinggi.

Menurut Todaro dan Smith (2011) Pertumbuhan ekonomi adalah suatu faktor utama dimana menyokong kesuksesan ekonomi negara, bisa juga sebagai pengukur kinerja ekonomi negara, dan juga akan mengurangi kemiskinan di bidang terkait. Terdapat beberapa indikator pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, antara lain: ketimpangan pendapatan, perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan kesempatan kerja, tingkat kenyamanan serta distribusi, dan PDRB daerah.

**Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2019**



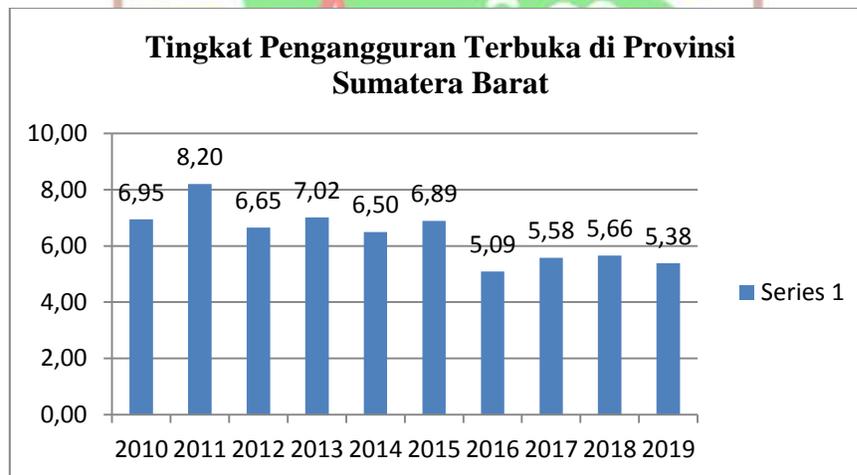
*Sumber: BPS Prov. Sumbar, tahun 2020.*

Dari grafik di atas dapat dilihat angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 sebesar 5,94% dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 6,34%. Pada tahun 2012 angka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 6,31% dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 5,05%.

Pengangguran diartikan sebagai situasi individu yang dikategorikan kedalam tenaga kerja tidak bekerja atau sedang melamar kerja. Satu dari faktor penting dalam memastikan kesejahteraan seseorang ialah tingkat pendapatan. Oleh karena itu, pengangguran mengacu pada keadaan di mana seseorang tidak bekerja atau dalam tahap mencari kerja dan tidak dapat melingkapi kebutuhan hariannya dikarenakan kekurangan pekerjaan. Banyaknya penduduk yang menganggur juga berkaitan dengan populasi penduduk. Dikarenakan populasi penduduk yang bertambah setiap

tahun maka total penduduk yang tidak bekerja juga semakin meningkat. Seperti halnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang semakin meningkat setiap tahunnya, di satu sisi memang memberi efek positif yakni menyediakan tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah besar. Perkembangan penduduk yang pesat mengakibatkan surplus tenaga kerja, dan jika kesempatan kerja tidak diperluas maka akan menimbulkan pengangguran. Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat meningkat jumlah penduduk tinggi dan pendatang yang meningkat.

**Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2019**



Sumber: BPS Prov. Sumbar, tahun 2020.

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa di tahun 2010 hingga 2019 angka tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,95% dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 8,20%, dimana kenaikan dan penurunan terjadi juga pada tahun 2012

sampai 2016. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 5,58% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 5,38%.

Ada hubungan erat antara perkembangan ekonomi dengan kemiskinan, karena tingkat kemiskinan cenderung semakin tinggi dalam termin awal proses pembangunan, dan secara bertahap menurun pada tahap pembangunan selanjutnya. Lebih lanjut, menurut Kuznets, proses pembangunan akan dibarengi dengan peningkatan dari inequality secara substansial agar masyarakat miskin mendapat bagian dari pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2011).

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik serta akan meneliti **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat”**. penelitian bertujuan untuk studi proposal penelitian dan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut::

1. Bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2010-2019?
2. Bagaimana dampak dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2010-2019?

## 1.2 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2010-2019.
2. Menganalisa pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terkait kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2010-2019.

## 1.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memperluas pemahaman dalam melakukan riset mengenai dampak IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran pada Kemiskinan Sumatera Barat. Terutama penelitian ilmu ekonomi sumber daya manusia.

2. Bagi Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta tambahan bacaan di pustaka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Serta menjadikan rujukan penelitian lanjutan.

3. Pemerintah

Penelitian diharapkan memiliki sisi positif serta semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam mengambil

kebijakan untuk memanfaatkan dampak IPM, Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup berfokus pada keterkaitan antara Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat. Cakupan penelitian ini meliputi 7 Kota dan 12 Kabupaten yang ada di Sumatera Barat dengan periode waktu 2010-2019.

Berdasarkan fokus penelitian, maka beberapa variabel yang dipakai pada penelitian ini mencakup variabel - variabel IPM, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta kemiskinan di Sumatera Barat. Variabel-variabel yang diteliti dan data yang dipakai pada penelitian ini adalah data yang didapat dari BPS di Sumatera Barat.

#### **1.5 Sistem Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta ruang lingkup penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan Kerangka teori dan kajian terdahulu sebagai dasar dalam penyusunan kerangka analisis (pemikiran) serta hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan jenis penelitian, tujuan spesifik penelitian, waktu, serta tempat penelitian, data serta sumber data penelitian metode penelitian, serta teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisikan tentang gambaran umum variabel, hasil analisis data serta interpretasi hasil analisis data.

### BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan serta saran

